

Peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

^{1*}Adib Khusnul Rois, ²Arif Santoso, ³Azid Syukroni, ⁴Muslih Candrakusuma

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

*adibkhusnulrois@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:

10 Januari 2024

Accepted:

19 Januari 2024

Publish:

06 Desember 2024

Article Type:

Field Research

ABSTRACT (English)

Indonesian Employment Services Companies can play an important role in improving the community's economy, especially from a sharia economic perspective. From a sharia economic perspective, this is very important because investment in human resources is considered a better investment than investment in goods and capital. By improving the quality of the workforce, the Indonesian Employment Services Company can make a greater contribution in developing more productive economic sectors, such as the service and industrial sectors. By paying attention to these aspects, the Indonesian Employment Services Company can help build a more inclusive, fair and sustainable economy, which is in line with sharia economic goals. This research was conducted with the aim of, first. To find out the role of Private Indonesian Migrant Worker Placement Implementers in sending Indonesian Migrant Workers abroad which includes the recruitment process, provision, departure and working relationships with agents abroad. Second. To find out the role of the Indonesian Employment Services Company in improving the economy of the study community at the Mulia Laksana Sejahtera Limited Liability Company, Ponorogo Branch. The results of this research, first, are that Private Indonesian Worker Placement Implementers have an important role in providing employment opportunities through sending Indonesian Workers abroad. The Implementer of Private Indonesian Worker Placement is responsible for carrying out good recruitment, providing provision and training, ensuring safe and legal departure, as well as protecting and paying attention to the welfare of Indonesian Workers. Second, the mechanism for improving the community's economy through Indonesian workers can be carried out by prioritizing income and remittances for Indonesian workers obtained through work that is halal and in accordance with sharia principles. Returning Indonesian workers can strengthen the sharia economy with sharia businesses that will strengthen the halal sector and create jobs in accordance with sharia principles.


KEYWORD:

Indonesian Employment Services Companies,
Sharia Principles,
Indonesian Workers.

ABSTRAK

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, ini sangat penting karena investasi pada sumber daya manusia dianggap sebagai investasi yang lebih baik daripada investasi pada barang dan modal. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, PJTKI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengembangkan sektor ekonomi yang lebih produktif, seperti sektor jasa dan industri. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, PJTKI dapat membantu membangun ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang sesuai dengan tujuan ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama. Untuk mengetahui peran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri yang meliputi proses rekrutmen, pembekalan, pemberangkatan hingga hubungan kerja dengan agen di luar negeri. Kedua. Untuk mengetahui peranan PJTKI dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi di PT. Mulia Laksana Sejahtera Cabang Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini, pertama, PPTKIS memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja melalui pengiriman TKI ke luar negeri. PPTKIS bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen yang baik, memberikan pembekalan dan pelatihan, memastikan pemberangkatan yang aman dan legal, serta melindungi dan memperhatikan kesejahteraan TKI. Kedua, Mekanisme peningkatan ekonomi masyarakat melalui TKI dapat dilakukan dengan mengutamakan pendapatan dan remitansi TKI yang diperoleh melalui pekerjaan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. TKI yang pulang dapat memperkuat ekonomi syariah dengan usaha syariah yang akan memperkuat sektor halal dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan prinsip syariah.

Copyright © 2024. **Musyarakah: Journal of Sharia Economics**,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 

1. Pendahuluan

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sangat bergantung pada peran Penting Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). PPTKIS merupakan lembaga yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan perekrutan dan penyaluran TKI ke luar negeri. (Yuono, 2011: 145) Tugas PPTKIS meliputi perekrutan, seleksi, pelatihan, penempatan, dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Melalui proses seleksi yang ketat, PPTKIS bertanggung jawab memilih calon TKI yang memenuhi persyaratan dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja di negara tujuan. PPTKIS juga memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dijalani oleh TKI di luar negeri. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing TKI di pasar kerja internasional. (Rusmana, 2019: 256)

Terjadi kecenderungan bahwa beberapa PPTKIS tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka sebagai pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Mereka lebih prihatin dengan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan TKI yang akan dikirim. Salah satu isu yang sering muncul adalah pengiriman TKI secara ilegal. PPTKIS yang tidak bertanggung jawab sering memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan biaya pengiriman yang lebih murah dibandingkan dengan PPTKIS yang sah. Hal ini mengancam keselamatan dan hak-hak TKI serta merugikan reputasi Indonesia sebagai negara pengirim TKI yang bertanggung jawab. (Bahar, 2020: 230). Namun, TKI yang dikirimkan secara ilegal ini seringkali mengalami berbagai macam masalah seperti kerja paksa, penganiayaan, dan bahkan kematian.

Selain itu, isu lainnya adalah terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri. PPTKIS yang tidak bertanggung jawab seringkali tidak memberikan informasi yang cukup terkait dengan kondisi di negara tujuan, hak-hak TKI, dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh. Hal ini membuat TKI menjadi rentan terhadap berbagai macam masalah seperti pelecehan seksual, pemutusan hubungan kerja yang sepihak, dan bahkan kekerasan fisik. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri untuk mengatasi fenomena dan isu yang terjadi. (Putri, 2020: 27) Namun, keberadaan PPTKIS yang tidak bertanggung jawab masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga PPTKIS dan sanksi yang lebih tegas terhadap

oknum PPTKIS yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan perlindungan TKI di luar negeri dapat ditingkatkan dan fenomena yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dalam publikasi "Statistik Indonesia 2022," jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebanyak 7,09 juta orang pada tahun 2021. (<https://www.bps.go.id/publication>) Negara-negara tujuan utama bagi tenaga kerja Indonesia adalah Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Penelitian peran PJTKI dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo memerlukan lokasi yang tepat. Lokasi yang umumnya digunakan dalam penelitian ini adalah di kantor PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo. Para peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana PJTKI mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat di lokasi ini. Selain itu, lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan program PJTKI dan memperoleh pandangan yang lebih baik tentang bagaimana program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lokasi penelitian yang tepat menjadi kunci utama dalam memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membantu dalam pengembangan program PJTKI di masa depan.

Alasan mendasar yang mendasari pemilihan obyek penelitian ini adalah peran krusial Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Meskipun sebagian besar PPTKIS menjalankan tugasnya dengan baik membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terdapat isu serius terkait beberapa PPTKIS yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan pengiriman TKI secara ilegal dan kurangnya perlindungan bagi TKI di luar negeri. Pengawasan yang ketat dan regulasi yang lebih tegas terhadap PPTKIS yang tidak bertanggung jawab menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan TKI dan mengurangi dampak negatif sosial dan ekonomi.

PJTKI juga harus memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di tempat kerja baru. Penyaluran tenaga kerja melalui PJTKI dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo dalam jangka panjang, karena dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat lebih detail mengenai "Peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di PT. Mulia Laksana Sejahtera Cabang Ponorogo)".

2. Kajian Pustaka

a. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Muhammad Akram Khan, (khan: 2023) ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindarkan mereka dari kemiskinan dan ketidakadilan. (Khan, 1983: 23) Prinsip-prinsip ekonomi syariah mengacu pada nilai-nilai moral dan etika Islam dalam mengatur aspek ekonomi. Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah adil dan tidak merugikan pihak manapun. Prinsip ini mengacu pada kewajiban setiap individu untuk memperhatikan

kepentingan bersama dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. (Hakim, 2014: 56) Dalam ekonomi syariah, konsep adil juga diterapkan dalam sistem distribusi kekayaan, di mana kekayaan harus didistribusikan secara merata dan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang atau kelompok. (Fauzan, 2018: 40)

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam operasional suatu organisasi. SDM meliputi segala aspek yang terkait dengan karyawan, mulai dari perekrutan hingga pengembangan dan pemberhentian. (Bramantyo, 2018: 12) Sumber Daya Manusia juga membahas tentang manajemen karyawan dan bagaimana karyawan dapat diintegrasikan dengan baik dalam organisasi. Pada dasarnya, SDM memiliki peran penting dalam menciptakan keberhasilan organisasi, karena karyawan merupakan aset utama suatu perusahaan. Dalam praktiknya, manajemen SDM meliputi berbagai aspek, seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja, dan kompensasi. Perekrutan karyawan yang tepat sangat penting bagi suatu organisasi karena karyawan yang kompeten dan berkualitas dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Selain itu, organisasi juga harus memastikan bahwa karyawan mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang cukup agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka di masa depan. (Sudarsono, 2021: 25)

c. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri harus dilakukan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka, dan meliputi proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan hingga ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) merupakan badan hukum yang memiliki izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. PPTKIS bertanggung jawab atas keseluruhan proses tersebut, termasuk memberikan perlindungan terhadap TKI selama bekerja di luar negeri dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004)

d. Ekonomi dan Keterkaitannya dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia berperan penting dalam perekonomian nasional dan global. Mereka menyediakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor industri di seluruh dunia. Dalam hal ini, teori ekonomi dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kinerja mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. (Widyawati, 2016:29) Salah satu teori ekonomi yang relevan dengan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan investasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan produktivitas. (Sarana, 2015: 67) Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan investasi dengan menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih.

e. Peran Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

PJTKI juga dapat membantu mendorong perekonomian lokal melalui pengelolaan remitansi yang diterima oleh pekerja migran. Remitansi yang dikirimkan oleh pekerja migran dapat menjadi sumber pendapatan bagi keluarga mereka, sehingga mendorong konsumsi dan meningkatkan perekonomian di daerah asal mereka. (Akhmadi, 2019: 149) Selain itu, dengan adanya perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dapat mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. PJTKI juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia melalui program pelatihan dan sertifikasi yang disediakan. Dengan keterampilan yang lebih baik, tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar global dan menjadi lebih produktif dalam pekerjaannya. (Surachmad, 2020: 226)

3. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau masalah sosial secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sugiono, 2019: 35) Penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi data dan penjelasan yang diperoleh dari informan atau partisipan, sehingga peneliti dapat memahami perspektif mereka tentang topik yang diteliti. Peneliti tidak hanya berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. (Sugiono, 2019: 35) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, pertama. Untuk mengetahui peran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri yang meliputi proses rekrutmen, pembekalan, pemberangkatan hingga hubungan kerja dengan agen di luar negeri. Kedua. Untuk mengetahui peranan PJTKI dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi di PT. Mulia Laksana Sejahtera Cabang Ponorogo.

4. Hasil Dan Pembahasan

a. Peran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam Berkontribusi Untuk Menyediakan Lapangan Kerja

PPTKIS (Pengguna Tenaga Kerja Indonesia Swasta) memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk menyediakan lapangan kerja melalui proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri. Dalam rangka melaksanakan perannya, PPTKIS harus beroperasi sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini termasuk memastikan bahwa agen-agen yang bekerja sama dengan PPTKIS juga beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Ramasyah, Wawancara, 2023) Berikut adalah beberapa peran PPTKIS dalam proses pengiriman dan menyediakan lapangan kerja untuk para TKI:

1) Proses rekrutmen

Sebagai perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), PT. Mulia Laksana Sejahtera (PT. MLS) Cabang Ponorogo memegang tanggung jawab besar dalam melakukan proses rekrutmen calon TKI yang memenuhi kriteria yang

telah ditentukan oleh pemerintah, seperti seleksi, pemeriksaan kesehatan, dan verifikasi dokumen. Selama tiga tahun terakhir, PT. MLS Cabang Ponorogo telah mendaftarkan lebih dari 3000 TKI dengan rentang usia antara 21 hingga 40 tahun, yang berasal dari latar belakang ekonomi sulit, masalah rumah tangga, dan tujuan untuk mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Berikut ini merupakan data TKI yang dapat direkrut dari perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), PT. Mulia Laksana Sejahtera (PT. MLS) Cabang Ponorogo:

Tabel. 1. TKI PT. PT. MLS Cabang Ponorogo

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRT	34	64	64	50	33	65	33
Formal	27	127	94	33	37	74	15

2) Pembekalan

Proses pembekalan yang dilakukan oleh PPTKIS kepada calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) setelah proses rekrutmen selesai bertujuan untuk mempersiapkan mereka sebelum berangkat ke luar negeri. Pembekalan ini mencakup beberapa aspek penting yang akan membantu calon TKI dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di negara tujuan.

Berikut adalah penjelasan mengenai proses pembekalan berdasarkan data yang diberikan:

1. Pelatihan Bahasa Asing
2. Pelatihan Keterampilan Kerja
3. Pemahaman tentang Hukum, Adat Istiadat, dan Budaya Negara Tujuan.

Berikut ini merupakan data TKI yang diberangkatkan dari perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), PT. Mulia Laksana Sejahtera (PT. MLS) Cabang Ponorogo:

Tabel. 2. TKI PT. PT. MLS Cabang Ponorogo

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PRT	33	55	64	39	22	44	30
Formal	17	59	63	22	37	33	14

b. Peran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam Berkontribusi Untuk Menyediakan Lapangan Kerja

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri telah menjadi fenomena yang umum terjadi di Indonesia. Dalam Islam, bekerja memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar mencari nafkah. Selain memenuhi kebutuhan diri sendiri, bekerja juga menjadi sarana untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Agama Islam menegaskan betapa pentingnya bekerja secara halal dan menjauhi pekerjaan yang haram atau berpotensi merugikan orang lain. (Unal, 2008: 122) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 menjadi salah satu dasar kewajiban bekerja bagi seorang muslim sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta, sesungguhnya menghambur-hamburkan harta itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah melarang umat muslim menghambur-hamburkan harta, dan mengajarkan agar berhemat dan menabung untuk kepentingan masa depan. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa membunuh diri sendiri adalah tindakan yang dilarang oleh Allah, karena setiap orang harus menjaga keselamatan dirinya sendiri. (Sihab, 2002: 210)

Dalam menyediakan lapangan kerja, PPTKIS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa TKI dikirim ke luar negeri sesuai dengan prinsip syariah melalui cara-cara yang legal, aman, dan bermanfaat bagi TKI dan mengurangi pengangguran. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa PPTKIS menjalankan perannya dengan profesionalisme dan mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku untuk melindungi kepentingan TKI.

c. Mekanisme Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan PT. Mulia Laksana Sejahtera Cabang Ponorogo yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa mekanisme peningkatan ekonomi masyarakat melalui Penyaluran Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) berdasarkan perspektif ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan beberapa Langkah sebagai berikut: (Ramasyah, Wawancara: 2023)

1) Pengawasan

Proses pengawasan yang dilakukan oleh PPTKIS (Penyelenggara Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) setelah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tiba di negara tujuan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa TKI bekerja dalam lingkungan yang aman, adil, dan sesuai dengan kontrak (tidak melanggar UU dan sesuai syariah) yang telah disepakati.

Pengawasan yang dilakukan oleh PPTKIS penting untuk memastikan bahwa TKI mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak selama bekerja di luar negeri. Melalui pengawasan ini, PPTKIS berperan dalam menjaga kepentingan TKI, memastikan kepatuhan terhadap kontrak, menjalin hubungan baik dengan agen di luar negeri, serta melindungi hak-hak TKI dari pelanggaran. Tujuan akhir dari pengawasan ini adalah menjaga kesejahteraan dan keselamatan TKI, serta mencegah eksploitasi atau penyalahgunaan dalam lingkungan kerja di luar negeri.

2) Pelaporan

Proses pelaporan yang dilakukan oleh PPTKIS (Penyelenggara Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) kepada pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai jumlah, kondisi kerja, dan perlindungan yang diberikan kepada TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mereka kirimkan ke luar negeri. Pelaporan data oleh PPTKIS kepada pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi, meningkatkan perlindungan, menyediakan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, serta mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja dan perlindungan bagi TKI.

3) Hubungan kerja dengan agen di luar negeri

PPTKIS (Pengguna Tenaga Kerja Indonesia Swasta) memiliki peran penting dalam menjalin hubungan kerja dengan agen di luar negeri. PT. Mulia Laksana Sejahtera memiliki hubungan kerja dengan agensi di luar negeri yang bertindak sebagai perwakilan perusahaan. Agensi tersebut membantu mencari kesempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia dan bertanggung jawab atas pengurusan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, agensi juga menanggung sepenuhnya kesejahteraan pekerja migran tersebut selama mereka bekerja di luar negeri. PT. Mulia Laksana Sejahtera tidak bertanggung jawab penuh atas pekerja migran yang memperpanjang kontrak kerja mereka di luar negeri setelah kontrak awal berakhir. (Ramasyah, Wawancara: 2023)

Dalam perspektif ekonomi syariah, analisis kinerja perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia tidak hanya dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan moral dalam berbisnis. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang tenaga kerja, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia harus memastikan bahwa pekerja yang direkrut dan ditempatkan di luar negeri mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam ekonomi syariah, menjadi keharusan memastikan bahwa semua aspek ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan memperhatikan aspek syariah, peningkatan ekonomi melalui TKI dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penempatan tenaga kerja Indonesia melalui PJTKI dapat dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aspek keuangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa aspek yang relevan dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Pembiayaan:** Dalam ekonomi syariah, pembiayaan harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan spekulasi. Dalam penempatan tenaga kerja, PJTKI dapat menggunakan pendekatan pembiayaan syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerjasama).
- 2) **Investasi:** Dalam ekonomi syariah, investasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti larangan investasi dalam sektor yang diharamkan (misalnya alkohol, perjudian, atau industri pornografi). PJTKI yang beroperasi dalam ekonomi syariah perlu memastikan bahwa investasi mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Dalam ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, seperti perlakuan yang adil terhadap pekerja, pembayaran gaji yang tepat waktu, dan perlindungan hak-hak pekerja. PJTKI dalam ekonomi syariah perlu memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria ini dan menghindari praktik eksploitasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi syariah, ada juga pertimbangan etis dan moral yang perlu diperhatikan. Misalnya, PJTKI perlu memastikan bahwa tenaga kerja yang mereka tempatkan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah, seperti prostitusi, perdagangan narkoba, atau pekerjaan yang melanggar nilai-nilai agama. (Beik, 2019: 232)

Dalam hal ini, PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Ponorogo dengan melakukan pengawasan, pelaporan dan Kerjasama luar negeri menjadikan pengiriman TKI ke luar negeri melalui PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo dapat membantu masyarakat di Ponorogo mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak melanggar dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prostitusi, perdagangan narkoba, atau pekerjaan yang melanggar nilai-nilai agama di luar negeri serta membantu memperkuat perekonomian daerah melalui remitansi dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Selain itu TKI dipastikan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan kontrak sebelum pemberangkatan.

Studi di PT. Mulia Laksana Sejahtera cabang Ponorogo membuktikan bahwa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTki) dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sukses, dimana kebutuhan keluarga TKI terpenuhi dengan baik, seperti membeli rumah dan kendaraan bermotor, menyekolahkan dan menguliahkan anak, membeli sawah, membuka usaha, dan sebagainya. Ini adalah hasil dari visi dan misi yang berhasil dilaksanakan oleh PT. Mulia Laksana Sejahtera.

5. Penutup

Peran penting PPTKIS (Penyelenggara Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) terlihat jelas dalam menyediakan lapangan kerja melalui pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri. Dengan melakukan proses rekrutmen yang baik, memberikan pembekalan dan pelatihan, serta memastikan pemberangkatan yang aman dan legal, PPTKIS berkontribusi dalam menciptakan peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang mencari kesempatan kerja di negara lain. Selain itu, PPTKIS juga memegang tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan TKI selama bekerja di luar negeri, menjalankan peran mereka dengan profesionalisme dan mematuhi nilai-nilai Islam, seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan keadilan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dalam proses penempatan TKI, PPTKIS berharap dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan berkah dari Allah SWT dalam upaya mereka untuk membantu masyarakat Indonesia mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Mekanisme peningkatan ekonomi masyarakat melalui Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan dan remitansi TKI harus diperoleh melalui pekerjaan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah hal ini dapat dipastikan melalui pengawasan, pelaporan dan Kerjasama luar negeri. Remitansi yang diterima juga harus dikelola dengan prinsip syariah untuk konsumsi dan investasi yang halal. Dana yang diterima melalui remitansi dapat dialokasikan ke investasi produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sektor halal. TKI yang kembali dapat memperkuat ekonomi syariah dengan mendirikan atau mendukung lembaga keuangan syariah, perusahaan halal, atau usaha syariah lainnya, yang akan memperkuat sektor halal dan menciptakan lapangan kerja sesuai dengan prinsip syariah. TKI dan keluarga mereka dapat terlibat dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menggunakan produk keuangan syariah seperti tabungan, investasi, dan

pembiayaan syariah. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan keuangan syariah merupakan mekanisme penting, di mana TKI dan keluarga mereka dapat berperan sebagai agen perubahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa semua aspek ekonomi dilakukan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial, dan dengan mempertimbangkan aspek syariah ini, peningkatan ekonomi melalui TKI dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

6. Referensi

- Akhmadi, Heri. (2019). *Ekonomi Makro: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bahar, Budiarmanto. (2020). *Cermin: Memetik Pelajaran dari Berbagai Fenomena dan Peristiwa di Negara-Negara Lain*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Beik, M. Irfan Syauqi, (2019). *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Bramantyo, Agus. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Muhammad. (2018). *Ekonomi Syariah: Teori dan Konsep*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, Endang Lukman. (2014). *Konsep Ekonomi Syariah: Tinjauan Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khan, Muhammad Akram. (1983). *Islamic Economics: A Survey Of The Literature*. Karachi: Islamic Research Academy.
- Putri, Veronica. (2020). *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rusmana, Agus. (2019). *The Future of Organizational Communication In The Industrial Era 4.0*. Bandung: Media Akselerasi.
- Sasana, Hadi. (2015). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Shihab, Alwi. (2018). *Menggerakkan Kekuatan Perempuan dalam Bisnis*. Jakarta: Republika.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono, Bambang. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Campuran*. Bandung: Alfabeta.
- Surachmad, Winarno. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widyawati, Diah. (2016). *Ekonomi Bisnis dan Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yuwono, Triwibowo. (2018). *Desain Penelitian Eksperimen dan Quasi Eksperimen*. Yogyakarta: Gava Media.